

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Bantuan Hukum

A.1. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan Hukum dapat diartikan secara luas yaitu sebagai upaya membantu golongan miskin dalam bidang hukum. sedangkan dalam pengertian sempit adalah jasa hukum yang khusus diberikan secara cuma-cuma kepada orang miskin baik diluar maupun didalam pengadilan pidana, perdata, dan tata usaha negara, oleh seseorang / lebih yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum serta hak asasi manusia.¹² Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan pengertian “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu”. Sedangkan menurut UU Bantuan Hukum Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.

Kemudian didalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh

¹²Muhammad Irsyad Thamrin dan Mohammad Farid, 2010. *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*. Yogyakarta: LBH Yogyakarta, Hlm. 708

pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”.¹³ Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 tersebut diatas adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan secara layak dan mandiri. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum.

Bantuan hukum adalah media bagi warga Negara yang tidak mampu untuk dapat mengakses terhadap keadilan sebagai manifestasi jaminan hak-haknya secara konstitusional. Masalah bantuan hukum meliputi masalah hak warga Negara secara konstitusional yang tidak mampu, masalah pemberdayaan warga Negara yang tidak mampu dalam akses terhadap keadilan, dan masalah hukum faktual yang dialami warga Negara yang tidak mampu menghadapi kekuatan Negara secara struktural.¹⁴ Pengertian bantuan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah pembelaan yang diperoleh seorang terdakwa dari seorang penasehat hukum, suatu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau sewaktu dalam proses pemeriksaan perkaranya dimuka pengadilan.¹⁵

Sedangkan Adnan Buyung Nasution menerangkan bahwa “Bantuan

¹³Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan

¹⁴Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Bantuan. Hlm. 4

¹⁵Soerjono Soekanto, 1981. *Bantuan Hukum Suatu Tindakan Sosio Yuridis*. Bandung. PT Chalin. Hlm. 50

hukum ialah sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yakni: Aspek perumusan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati”.¹⁶

Sedangkan Berdasarkan sifatnya terdapat 2 (dua) tipe bantuan hukum, yaitu:¹⁷

- a. Bantuan hukum yang bersifat kedermawanan/karitas (*charity*) atau konvensional.

Merupakan bantuan hukum tipe yang menempatkan posisi para pencari keadilan sebagai obyek yang harus dibantu sepenuhnya karena berada dalam posisi pasif. Para pencari keadilan dalam menyelesaikan masalah hukum sangat bergantung pada pemberi bantuan hukum. para pencari keadilan berperan dalam memberi informasi atau data untuk kepentingan atas fakta hukum, namun tidak banyak terlibat dalam upaya pemecahan dan penyelesaian masalah hukum. bantuan dalam bentuk ini bersumber dari tanggungjawab moral maupun profesional para advokat, sifatnya individual, pasif, terbatas pada pendekatan hukum positif/tertulis dan berorientasi pada pemecahan masalah melalui jalur peradilan.

¹⁶*Ibid.* Hlm. 95

¹⁷Muhammad Insyad Thamrin dan Muhammad Farid, 2010. *Panduan Bantuan Hukum Bagi Para Legal*. Yogyakarta. LBH Yogyakarta. Hlm. 109-110

- b. Bantuan hukum yang bersifat pemberdayaan masyarakat atau penguatan (*empowering*) atau struktural.

Bantuan hukum ini menpatkan posisi pencari keadilan sebagai subyek yang berperan serta dalam memecahkan masalah hukum yang dihadapi. Pencari keadilan terlibat mulai pada saat pengumpulan informasi/data, pemetaan masalah, analisis masalah sampai dengan strategi dan cara pemecahan masalah yang akan dilakukan. Tipe bantuan hukum ini mengarah pada upaya penyadaran hukum, sekaligus juga pendidikan hukum agar kelak mereka mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum serupa. Pencari keadilan berposisi mitra bagi pemberi bantuan hukum. bantuan hukum struktural menggunakan pendekatan kelompok dan mencari akar masalah yang dihadapi.

Dari pengertian diatas bisa peneliti simpulkan bahwa Bantuan Hukum merupakan pemberian jasa hukum yang dilakukan advokat maupun lembaga bantuan hukum terhadap orang/kelompok orang miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi baik dalam persoalan hukum perdata, pidana, tata usaha negara baik itu didalam Pengadilan (*litigasi*) dan diluar pengadilan (*Non Litigasi*) sehingga mereka memperoleh akses keadilan dan bisa membela hak-hak asasi mereka ketika dihadapkan dengan persoalan hukum.

A. 2. Perkembangan Bantuan Hukum di Indonesia

Konsep Bantuan Hukum di Indonesia, sebagaimana diartikan dan

dilaksanakan di Indonesia sekarang ini, merupakan hal yang baru sama sekali. Bahwa hal itu mulai ada dengan lahirnya Lembaga Bantuan Hukum. memang benar bahwa bantuan hukum dalam arti yang sangat terbatas telah ada pada jaman penjajahan dan bahwa pengacara-pengacara Indonesia telah memberikan bantuan hukum sejak waktu itu. Akan tetapi dengan mengemukakan hal itu kita tidak bisa mendapatkan gambaran yang sebenarnya dari cita-cita atau konsep bantuan hukum saat ini, paling tidak mengurangi dari pada konsepan bantuan hukum yang pada saat ini sedang berkembang di Indonesia.¹⁸

Lembaga Bantuan Hukum didirikan pada tanggal 28 okteber 1970 oleh Peradin¹⁹ berdasarkan sebuah usul yang diajukan penulis dalam kongres ketiga Peradin pada tahun 1969 di Jakarta. Perlu dicatat bahwa sebelum Lembaga Bantuan Hukum berdiri sudah ada organsasi seperti Tjandra Naya²⁰ yang memberikan bantuan hukum yang terbatas kepada keturunan Cina. Dan juga ada Biro Konsultasi dari Universitas Negeri di Indonesia, seperti Universitas Indonesia di Jakarta, Unpad di Bandung, Universitas Airlangga di Surabaya dan lain-lain telah didirikan. Biro-biro ini hanya memberikan bantuan hukum kepada si miskin, tetapi tujuan utamanya adalah pada dasarnya untuk menjadikannya sebagai tempat latihan bagi mahasiswa hukum dimana mereka mendapatkan keahlian yang diperlukan untuk dipakai untuk masa yang akan datang dalam masyarakat.

¹⁸*Ibid.* Hlm. 51

¹⁹Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) pada tanggal 30 Agustus 1964 di Solo.

²⁰Pada Tahun 1953 Didirikan Semacam Biro Konsultasi Hukum Pada Sebuah Perguruan Tionghoa Sim Ming Hui Atau Tjandra Naya.

Gerakan bantuan hukum yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum tersebut mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atas keberhasilan-keberhasilannya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Gerakan bantuan hukum juga mempengaruhi gagasan dan konsepsi bantuan hukum di Indonesia pada waktu itu dan sekarang.

Dalam tahun 1973 didirikan sebuah Lembaga Bantuan Hukum bagi Wartawan oleh PWI²¹ dengan tujuan untuk memberikan bantuan hukum khususnya kepada Wartawan. Kemudian pada tahun 1977 Peradin Jakarta juga mendirikan sebuah Lembaga yang disebutkan Klinik Hukum dengan tujuan khusus memberikan bantuan hukum kepada rakyat yang berpenghasilan sedang dengan biaya yang seringan mungkin. Berdirinya lembaga-lembaga bantuan hukum lainnya di daerah seperti Medan, Surabaya dan Semarang di tahun 1978 menandai dengan permulaan dari masa pertumbuhan yang cepat.²²

A. 3. Pengaturan Bantuan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Berikut ini klasifikasi pengaturan jaminan hak bantuan hukum di Indonesia:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.²³

²¹Persatuan Wartawan Indonesia selanjutnya dikenal dengan nama PWI adalah organisasi profesi wartawan pertama di Indonesia. PWI berdiri pada 9 Februari 1946 di Surakarta.

²²*Ibid.* Hlm. 57

²³Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

b. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.²⁴

Pasal 18

(4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

c. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁵

Pasal 56

(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Pasal 57

(1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²⁶

Pasal 54

²⁴Pasal 18 Ayat (4) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

²⁵Pasal 56 ayat (1), (2) dan Pasal 57 Ayat (1),(2), (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁶Pasal 54 dan Pasal 56 Ayat (1),(2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 56

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

e. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.²⁷

Pasal 22

(1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

f. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.²⁸

Pasal 4

(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.

(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum

g. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

²⁷Pasal 22 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. Tentang Advokat

²⁸Pasal 4 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Peraturan perundang-undang diatas merupakan memuat hak warganegara yang dihadapkan oleh pemasalahan hukum untuk diberikan bantuan hukum oleh Advokat, Lembaga Bantuan Hukum dan atau Organisasi Bantuan Hukum baik diluar maupun didalam pengadilan.

A. 4. Tujuan Bantuan Hukum

Ada beberapa penjelasan mengenai tujuan diselenggrakan bantuan hukum

Pasal 3 UU Bantuan Hukum menjelaskan bantuan hukum bertujuan untuk:²⁹

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun Lembaga Bantuan Hukum didirikan dengan konsep awal melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa mereka. Konsep ini kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar LBH yang didalamnya disebutkan bahwa tujuan LBH adalah:³⁰

- a. Memberi pelayanan hukum kepada rakyat miskin.

²⁹*Ibid.* Pasal 3

³⁰Binziad Kadafi, 2002. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta. Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia.Hlm. 163

- b. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat, terutama mengenai hak-haknya sebagai subjek hukum.
- c. Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat yang berkembang.

Sedang tujuan bantuan hukum struktural yaitu: Menciptakan terwujudnya sistem hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menjadi lebih adil, menjamin persamaam kedudukan baik dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.³¹

Dengan tujuan bantuan hukum seperti yang dijelaskan diatas. Dan juga maka bantuan hukum harus dimaknai secara meluas, dengan tidak hanya terbatas pada pemberian pelayanan dan pendampingan bagi masyarakat miskin dalam sistem hukum baik didalam maupun diluar pengadilan. Namun juga diharapkan kepada:

- a. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-kepentingan bersama mereka.
- b. Adanya pengertian bersama dikalangan masyarakat miskin tentang perlunya kepentingan-kepentingan bersama mereka dilindungi oleh hukum.
- c. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang hak-hak mereka yang sudah diakui oleh hukum.
- d. Adanya kecakapan dan kemandirian dikalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka didalam masyarakat.

³¹*Ibid.* Hlm. 712.

Dari penjelasan diatas jika ditarik suatu kesimpulan bahwa tujuan dari bantuan hukum merupakan agar masyarakat terwujudnya suatu keadilan dalam masyarakat, terpenuhinya hak dan kewajiban terhadap warga negara, terwujudnya persamaan masyarakat dalam hukum, terjamin hak asasi manusia, adanya peradilan yang efektif dan efisien, tegaknya supremasi peraturan hukum dalam masyarakat dan membangun hukum nasional. dan bantuan hukum (*legal Aid*) ini diberikan kepada orang yang tidak mampu, agar mereka bisa memperoleh keadilan sama dengan orang yang ekonominya sudah mapan didalam suatu masyarakat.³²

B. Tinjauan Tentang Lembaga Bantuan Hukum

B. 1. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum

Bahwa menurut UU Bantuan Hukum Pasal 1 angka 3 yang berbunyi "Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan undang-undang ini. Berdasarkan pasal 1 angka 3 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga bantuan hukum adalah pemberi bantuan hukum layanan Bantuan Hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma. menjelaskan Bahwa "Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa

³²Frans Hendra Winarta, 1995. *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan, Anggota Ikap. Hlm. 29

menerima pembayaran honorarium”.³³

Dari penjelasan diatas lembaga bantuan hukum merupakan suatu lembaga yang memberikan bantuan hukum atau layanan hukum secara cuma-cuma (*Prodeo*) kepada orang dan atau kelompok masyarakat miskin yang dihadapkan dengan persoalan hukum pidana, perdata maupun tata uasaha negara baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan.

B. 2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi LBH sebelum memberikan bantuan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bab IV pemberi bantuan hukum pasal 8 Ayat (2) syarat-syarat pemberi bantuan hukum yaitu:³⁴

- a. Berbadan hukum.
- b. Terakreditasi berdasarkan undang-undang ini.
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap.
- d. Memiliki pengurus.
- e. Memiliki program bantuan hukum.

B. 3. Sumber Pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Dalam Bab VII mengatur tentang Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum yang tertuang dalam pasal 16 Ayat (1) UU Bantuan Hukum bahwa mengenai “Pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan

³³*Ibid.* Pasal 1 angka 6.

³⁴*Ibid.* Pasal 8 Ayat (2)

untuk penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan dalam Ayat (2) selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari a.) hibah atau sumbangan ; dan/atau b.) sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Selain pasal pasal 16, dalam pasal 17 juga megatur ketentuan tentang sumber pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum adapun bunyi pasal 17 sebagai berikut :

1. Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.³⁵

Adapun tata cara pengajuan rencana anggaran bantuan hukum dia atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum pasal 42 Ayat (1) dan (2) dan pasal 43 Ayat (1) dan (2). Yang masing-masing berbunyi : ³⁶

Pasal 42 :

- 1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Kantor Wilayah ;
- 2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditandatangani ;

Pasal 43 :

- 1) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilakukan dengan

³⁵*Ibid.* Hlm. 5

³⁶*Ibid.* Pasal 42 Ayat (1) dan (2) dan pasal 43 Ayat (1) dan (2).

mengisi formulir proposal pengajuan anggaran yang memuat :

- a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. nama program;
 - c. tujuan program;
 - d. deskripsi program;
 - e. target pelaksanaan;
 - f. output yang diharapkan;
 - g. jadwal pelaksanaan; dan
 - h. rincian biaya program.
- 2) Format formulir proposal pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

C. Tinjauan Tentang Kesadaran Hukum

C. 1. Pengertian Kesadaran Hukum

Berikut beberapa mengenai pengertian Kesadaran hukum ialah:

Bernard Arief Sidharta mengemukakan "Kesadaran hukum adalah proses dalam kesadaran atau kejiwaan manusia yang di dalamnya berlangsung penilaian bahwa orang seharusnya bersikap dan bertindak dengan cara tertentu dalam situasi kemasyarakatan tertentu karena hal itu dirasakan adil dan perlu untuk terselenggaranya ketertiban masyarakat atau kondisi kemasyarakatan yang memungkinkan manusia menjalani kehidupan secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya."³⁷

Menurut paul scoholten sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mengatakan bahwa " kesadaran hukum merupakan suatu kategori, yaitu yang aprioristis umum tertentu dalam hidup kejiwaan kita yang menyebabkan kita dapat memisahkan antara hukum dan kebatilan

³⁷*Ibid.* Hlm. 203

(tidak hukum), yang tidak ubahnya dengan benar dan tidak benar dan buruk”³⁸

Sedangkan menurut Laura Nielsen kesadaran hukum sebagaimana orang berpikir tentang hukum, tentang norma-norma umum dari hukum, tentang praktik setiap hari, dan tentang cara yang umum digunakan dalam berhubungan dengan hukum atau permasalahan hukum.³⁹

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum bahwa ”Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁴⁰

Ada 4 (empat) Indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya sebagai berikut:⁴¹

- a. Pengetahuan tentang hukum
- b. Pemahaman tentang hukum
- c. Sikap hukum

³⁸Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta. Liberty Yogyakarta. Hlm.113

³⁹Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H., M.H, 2012. *Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta. Prenada Media Group. Hlm. 338

⁴⁰*Ibid*. Pasal 1 angka 2

⁴¹Prof. Dr. H.R. Otje Salman, S.H dan Anton F. Susanto, S.H., M.Hum, 2012. *Beberapa Aspek sosiologi hukum*. Bandung. P.T Alumni. Hlm. 56

d. Pola-pola perikelakuan hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. sebagaimana dapat dilihat didalam masyarakat bahwa pada umumnya mencuri, membunuh, merampok dan memakai narkoba merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum.

Pemahaman hukum dalam artian disini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi perturan dari suatu hukum tertentu. Dengan perkataan lain pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu aturan hukum tertentu, hukum tertulis atau hukum tidak tertulis, serta mamfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermafaat atau menguntungkan jika hukum ditaati.

Pola perilaku hukum adalah merupakan hal yang utama dalam keasadaran hukum, karena dilihat disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat Setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada

tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.

Sedangkan pendapat R. Bierstedt sebagaimana dikutip oleh Dr. Saifullah, S.H., M.Hum bahwa kesadaran hukum didorong oleh sejauhmana keputahan kepada hukum yang didasarkan oleh:⁴²

- a. Indoktrination Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah hukum adalah karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaedah-kaedah telah ada waktu seseorang dilahirkan. Dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui, serta mematuhi kaedah-kaedah tersebut.
- b. Habituation Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Memang pada mulanya sukar sekali untuk mematuhi kaedah-kaedah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi apabila hal tersebut setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

⁴²Dr. Saifullah, S.H., M.Hum, 2013, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung. PT Refika Aditama. Hlm.105

- c. Utility Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi, apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaedah adalah karena kegunaan dari pada kaedah tersebut. Manusia menyadari bahwa apabila dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah.
- d. Group identification Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah, adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, dapat dikemukakan sebagai berikut:⁴³

- a. Compliance adalah suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar hukum.

⁴³*Ibid.* Hlm. 53-54

kepatuhan disini didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan.

- b. Identification adalah kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. kepatuhan didasarkan dari daya tarik yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut.
- c. Internalization adalah kepatuhan seseorang terhadap kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intriksi kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilai yang semula yang dianutnya.
- d. Kepentingan-kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.

C. 2. Pentingnya Kesadaran Hukum

Khususnya pemasalahan dalam negara-negara berkembang (Indonesia), yaitu masalah kesadaran hukum rakyat. Kesaadaran hukum ini dirasa cukup menentukan didalam pelaksanaan hukum. kesadaran hukum masyarakat, mengenai pengetahuannya hukum dan sikap hukum masyarakat.⁴⁴ Mengenai pengetahuan hukum masyarakat yaitu mengenai kecerdasan masyarakat terhadap suatu hukum, sedangkan sikap hukum masyarakat merupakan tindakan masyarakat yang sesuai dengan hukum.

⁴⁴Prof.Dr.Sacipto Raharjo S.H., 1980. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*.Bandung. Penerbit Alumni. Hlm. 138

Suatu masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, dan dengan demikian sadar akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, merupakan pra-kondisi bagi terlaksananya suatu negara hukum. hanya didalam masyarakat semacam itulah rakyat, termasuk golongan miskin dan lemah dari lapisan yang paling rendah, dapat diharapkan akan mempunyai pengetahuan, kemampuan dan keberanian untuk menuntut ditegakkannya segala prinsip-prinsip dan nilai-nilai negara hukum (yakni supremasi hukum, persamaan hukum, pengadilan yang adil, praduga tak bersalah, peradilan yang bebas dan tak memihak, dan sebagainya).⁴⁵

Di Indonesia masalah kesadaran hukum mendapatkan tempat yang sangat penting didalam politik hukum nasional. Hal ini dapat diketahui sebagaimana tercermin dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa.⁴⁶

2. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan kearah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dilakukan.
 - a. peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pemabaharuan, kodifikasi serta unifikasi dibidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan keasadaran hukum dalam masyarakat.
 - b. menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut porsinya masing-masing.
 - c. peningkatan kemampuan dan kewajiban penegak-penegak hukum.

⁴⁵*Ibid.* Hlm. 56

⁴⁶Prof. Dr. H.R. Otje Salman, S.H dan Anton F. Susanto, S.H., M.Hum, *Op, Cit.* Hlm. 67-68

3. memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintahan kearah penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terdapat harkat dan martabat manusia, dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Jelaslah bahwa kesadaran hukum masyarakat sesuatu yang sangat urgen untuk segera dilakukan pembinaan melalui pendidikan hukum atau penyuluhan hukum serta pemberdayaan masyarakat oleh karena kesadaran hukum merupakan ukuran dalam tegaknya supremasi hukum dan negara hukum yang dicita-citakan bangsa dan negara Indonesia. Maka dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum meniadakan tanggungjawab dalam mendorong kesadaran hukum masyarakat melalui program-program bantuan hukum non-litigasi seperti penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat miskin yang buta hukum.

C.3. Lembaga Bantuan Hukum dan Tanggungjawabnya Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat miskin.

Bahwa program bantuan hukum tidak dapat bersifat pasif seperti biasanya sebuah (*service station*), sekedar menunggu orang-orang yang tidak mampu untuk datang mencari bantuan hukum. program bantuan hukum harus secara aktif menunjang dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan membuat mereka menyadari adanya hak dan kewajiban.⁴⁷

Adapun bantuan hukum litigasi yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan

⁴⁷*Ibid.* Hlm. 54

Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang berdasarkan UU Bantuan Hukum ialah sebagai berikut.⁴⁸

- a. Pendampingan dan/atau menjangankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan, yang dimaksud disini memberikan bantuan hukum dalam permasalahan bidang pidana.
- b. Pendampingan dan/atau menjangankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan, dalam hal ini memberikan bantuan hukum dalam permasalahan hukum perdata.
- c. Pendampingan dan/atau menjangankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Hukum Tata Usaha Negara.

Adapun bantuan hukum non-litigasi yang diberikan pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum meliputi antara lain⁴⁹:

1. Penyuluhan Hukum

Pemberian bantuan hukum melalui penyuluhan hukum diberikan kepada kelompok orang miskin dengan bentuk antara lain: ceramah, diskusi, dan atau simulasi. Untuk dapat memberikan bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan

⁴⁸Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2014. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta. Yayasan obor Indonesia. Hlm. 483

⁴⁹Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pasal 8-22

hukum dengan mengisi formulir, diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum. kegiatan pemberian bantuan hukum penyuluhan hukum dapat dilakukan oleh pemberi bantuan hukum tanpa permohonan dari penerima bantuan hukum jika telah berkordinasi dengan lurah, kepala desa atau yang lainnya.

Adapun Penyelenggaraan penyuluhan hukum oleh pemberi bantuan hukum harus memenuhi syarat:

- a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang.
- b. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) jam.
- c. penyuluhan hukum dilaksanakan di tempat kelompok orang miskin berada.
- d. materi yang disampaikan terkait dengan upaya membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

2. Konsultasi Hukum

Kegiatan bantuan hukum berupa konsultasi hukum yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum dilakukan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum baik itu permasalahan hukum perdata, pidana maupun tata usaha negara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. Konsultasi hukum dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum diajukan oleh kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan

melampirkan surat keterangan miskin untuk mendapatkan Permohonan konsultasi hukum

3. Investigasi Kasus

Bantuan hukum berupa Investigasi Kasus dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum, Investigasi kasus dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan dari Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin. Hasil dari investigasi kasus yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum tersebut dibuat dalam bentuk laporan sesuai dengan formulir investigasi.

4. Penelitian Hukum

Bantuan hukum berupa Penelitian hukum yaitu dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi diwilayah Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan baik itu permasalahan pidana, perdata dan atau tata usaha negara. Pemberi Bantuan Hukum mengajukan terlebih dahulu proposal penelitian hukum kepada Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuk, Penelitian hukum tersebut dapat dilaksanakan setelah proposal penelitian mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuk, Penelitian hukum dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum. sedangkan Panitia itu terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota yang terdiri

atas unsur: a. advokat; b. paralegal; c. dosen; dan/atau d. mahasiswa fakultas hukum.

5. Mediasi

Bantuan hukum yang berupa Mediasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum perdata atau hukum tata usaha negara. Para pihak merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum. Mediasi dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan, untuk mendapat bantuan hukum berupa mediasi penerima bantuan hukum harus mengajukan Permohonan mediasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.

6. Negosiasi

Kegiatan bantuan hukum berupa Negosiasi yaitu dilakukan berdasarkan permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum. Negosiasi dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan, Permohonan negosiasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin, Pertemuan negosiasi harus dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum. Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan negosiasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi dalam bentuk tertulis.

7. Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan bantuan hukum berupa Pemberdayaan masyarakat dilakukan guna meningkatkan pengetahuan atau keterampilan hukum Penerima Bantuan Hukum yaitu:

- a) penanganan atau pemantauan kasus.
- b) penyusunan permohonan atau gugatan.
- c) pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.

Adapun mengenai Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum. Permohonan bantuan hukum pemberdayaan masyarakat diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah, kepala desa, atau nama lainnya sesuai dengan domisili Pemohon.

8. Pendampingan di Luar Pengadilan

Bantuan hukum berupa Pendampingan di luar pengadilan dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait. Permohonan pendampingan di luar pengadilan diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin, Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban berupa antara lain:

- a) pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan.
- b) pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

- c) pendampingan saksi dan atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak.
- d) pendampingan saksi dan atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan (*visum et repertum*) atau perawatan kesehatan.
- e) pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum.
- f) pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan.
- g) pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.

Kegiatan pendampingan di luar pengadilan yang dijelaskan diatas dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk satu kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama. Kegiatan pendampingan di luar pengadilan tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan. Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.

9. *Drafting* Dokumen Hukum

Bantuan hukum berupa *Drafting* dokumen hukum diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa: a. surat perjanjian. b. surat pernyataan c. surat hibah d. kontrak kerja e. Wasiat dan atau f. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendapatkan bantuan hukum berupa *drafting* dokumen hukum haru diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin kepada pemberi bantuan hukum. *Drafting* dokumen

hukum bukan merupakan bagian dari dokumen yang digunakan untuk pengajuan permohonan pencairan biaya untuk kegiatan Bantuan Hukum litigasi.

Dari beberapa kegiatan non litigasi tersebut diatas, setidaknya terdapat 2 kegiatan yang terkait dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yakni kegiatan penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Penyuluhan hukum dapat dilakukan dalam bentuk metode ceramah, diskusi dan simulasi. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk dilakukan guna meningkatkan pengetahuan atau keterampilan hukum Penerima Bantuan Hukum yaitu: a. penanganan atau pemantauan kasus. b. penyusunan permohonan atau gugatan c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.

Peningkatan kesadaran masyarakat merupakan hal yang penting agar masyarakat (terutama masyarakat miskin) dapat mengerti dan memahami serta dapat memperjuangkan hak-hak normatifnya disatu pihak, dilain pihak masyarakat miskin juga dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban hukumnya terhadap anggota masyarakat yang lain atau seperti apa yang sudah diatur dalam peraturan hukum. dan juga dapat terlindungi dari tindakan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum (abuse of power). Maka dari situlah dibutuhkan peran yang aktif dan masif yang dilakukan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum yang berupa penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat dalam mendorong dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum

Sedangkan bantuan non-litigasi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat miskin, yang sudah diatur didalam Pasal 1 angka 3 UU Bantuan Hukum bahwa Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.⁵⁰

Sebagaimana pula didalam Pasal 16 Ayat (2) Huruf a PP Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum menjelaskan bahwa:

“Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan: **a. penyuluhan hukum**, b. Konsultasi hukum, c. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik, d. penelitian hukum, e. Mediasi, f. Negosiasi, g. **Pemberdayaan masyarakat**, h. Pendampingan diluar pengadilan, i. Drafting dokumen hukum”.⁵¹

Penyuluhan hukum merupakan bantuan hukum non-litigasi yang dilakukan pemberi bantuan hukum (*Lembaga Bantuan Hukum*) melalui ceramah, diskusi dan atau simulasi terhadap kelompok masyarakat miskin yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat

Dan diatur pula dalam Pasal 9 (Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

⁵⁰*Ibid.* Pasal 1 angka 3

⁵¹*Ibid.* Pasal 16 Ayat (2) a

Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi syarat: a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang; b. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) jam; c. penyuluhan hukum dilaksanakan di tempat kelompok orang miskin berada; dan **d. materi yang disampaikan terkait dengan upaya membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.**

D. Tinjauan Tentang Masyarakat Miskin

D. 1. Pengertian Masyarakat Miskin

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll.⁵²

Sedangkan Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standart kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik,

⁵²Data Kemiskinan, <https://id.wikipedia> Diakses Pada Pukul 3 November 2017 Pukul 21.00 Wib.

dimensi social, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset.⁵³

Sedangkan Menurut Faturachman dan Marcelinus Molo, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau beberapa orang (rumah tangga) untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Adapunpun kebutuhan pokok telah dapat diidentifikasi kebutuhan dasar sebagai berikut: 1. Makanan, 2. Pakaian, 3. Perumahan, 4. Kesehatan, 5. Pendidikan, 6. Kebersihan, transportasi, 7. Partisipasi masyarakat.⁵⁴

D. 2. Syarat Yang Harus Dipenuhi Masyarakat Miskin Untuk dapat Diberi Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (*Prodeo*).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi Masyarakat miskin atau kelompok masyarakat miskin dalam mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum sebagai berikut:

Dijelaskan dalam Pasal 14 Ayat (1) dan (2) UU Bantuan Hukum bahwa untuk mengajukan permohonan bantuan hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut.⁵⁵

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;

⁵³Pengertian Rumah Tangga Miskin, <http://simasterhss.com/> Diakses Pada Tanggal 3 November 2017 Pukul 22.30 Wib.

⁵⁴Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers, 1985. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. CV. Rajawali. Hlm. 6

⁵⁵*Ibid.* Pasal 14 ayat (1) dan (2).

- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

D. 3. Hak Dan Kewajiban Masyarakat Miskin/Penerima Bantuan Hukum

Adapun Dalam Bab V UU Bantuan Hukum Mengenai Hak Dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum yaitu:

Pasal 12 Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.